

## **DAMPAK SOSIAL YANG TELAH TERJADI DARI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DARI JAKARTA KE KALIMANTAN TIMUR**

**Muhammad Rifaldi Assihidieq<sup>1</sup>, Harihanto<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis), bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial, positif maupun negatif, yang diberitakan oleh media massa dan media sosial. Proyek ini telah menimbulkan berbagai dampak sosial. Dampak positifnya antara lain “terciptanya lowongan kerja”, “meningkatkan kesempatan kerja”, “meningkatnya kunjungan wisatawan”, dan “meningkatnya pendapatan masyarakat lokal”. Hingga tahun 2024, jumlah pekerja yang terserap sebanyak 27.000 orang, dengan 70% pekerja dari luar daerah dan 30% warga lokal. Karena proyek ini berskala nasional dan melibatkan investor asing, maka dampaknya juga bersifat nasional bahkan internasional. Kunjungan wisatawan diperkirakan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar IKN, dan terdapat klaim bahwa pendapatan pengusaha lokal meningkat dua kali lipat. Namun, terdapat pula dampak negatif, seperti konflik antara warga lokal dengan Otorita IKN, contohnya di Kampung Tua Sabut yang mengalami penggusuran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola dampak sosial secara menyeluruh guna menciptakan keadilan sosial dan keharmonisan, serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat lokal.*

**Kata Kunci:** *Dampak Sosial yang Telah Terjadi, Pemindahan Ibu Kota Negara, IKN*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [m.rifaldiassihidieq23@yahoo.com](mailto:m.rifaldiassihidieq23@yahoo.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Anonim,2022). Kebijakan pemindahan ibu kota ini dilakukan dengan pertimbangan dan alasan yang kuat, dengan alasan utamanya adalah kota Jakarta dinilai sudah tidak mampu menopang beban dan sudah tidak layak lagi secara fisik. Kota Jakarta sudah terlalu padat penduduknya (“sangat padat” menurut Undang-Undang No. 56/PRP/1960. Pada tahun 2020). (1) Kepadatan penduduk Kota Jakarta mencapai 10.679.951 jiwa (detik.com, 2023), (2) Kualitas lingkungan fisik Kota Jakarta sudah sangat buruk, terutama kualitas udara (Times Indonesia, Jakarta), (3) Kota Jakarta sering mengalami banjir, termasuk banjir kiriman dan rob akibat adanya pengambilan air tanah oleh penduduk setempat dan perilaku membuang sampah sembarangan di sungai yang sering mengakibatkan tersumbatnya saluran pembuangan air di bagian hilir Sungai (Harihanto,2023).

Terhadap rencana pemindahan IKN ini terdapat pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro meyakini bahwa rencana ini akan mengurangi beban Ibu Kota Negara sebelumnya yaitu Kota Jakarta yang dinilai sudah tidak layak, dengan alasan antara lain; (1) Kepadatan penduduk yang sudah terlalu padat, (2) Menciptakan pemerataan pembangunan, (3) Dapat membuat sektor perkonomian menjadi lebih baik di tengah adanya ancaman resesi global (Kompas.com, 2023). Sedangkan pihak yang kontra terhadap pembangunan IKN adalah sebagian masyarakat setempat dan beberapa pejabat negara dan para ahli, yang menilai dengan adanya pemindahan IKN ini akan menciptakan masalah baru, antara lain: (1) mengancam ruang hidup masyarakat setempat, (2) berpotensi menggusur lahan milik masyarakat adat, (3) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara besar-besaran yang berpotensi menambah beban hutang negara (Kaltim post, 2024). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak sosial yang telah terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Negara hingga saat ini (tahap konstruksi). Dampak sosial tersebut terutama: (1) Terancamnya ruang hidup masyarakat lokal, (2) Tergusurnya masyarakat adat, (3) Masalah sosial yang dialami oleh masyarakat lokal.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Pembangunan Nasional dan Pemindahan Ibu Kota Negara***

Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan di dalam segala aspek untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk

mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan serta mempertimbangkan tantangan perkembangan global. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya (Iskandar, 2020).

Sebagai salah satu perwujudan pembangunan nasional, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah langkah pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara untuk mencapai negara yang berdaulat dan Makmur melalui Visi 2045 “Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”. Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi industri sesuai visi Indonesia 2045. Pemindahan IKN diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan perekonomian Indonesia yang lebih maju. Pada tahun 2045 diperkirakan PDB per kapita di Indonesia akan mencapai US\$ 23.119, dan pada tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan ke luar dari *middle income trap* (Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalimantan Barat, 2022).

Pada 19 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Wilayahnya ditentukan di tengah-tengah antara wilayah Kabupaten PPU dan Kukar dan wilayah tersebut diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih makmur dan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia (Kompas.com, 2019).

### **Dampak Sosial yang mungkin terjadi dari Pemindahan IKN**

Pada tahap konstruksi ini diperkirakan terdapat beberapa dampak sosial yang akan terjadi, antara lain: (1) terciptanya lowongan kerja, (2) meningkatnya kesempatan kerja, (3) meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, (4) meningkatnya kesempatan berusaha, (5) meningkatnya pendapatan masyarakat, (6) terciptanya pola nafkah ganda bagi penduduk lokal, dan (7) bertambahnya jenis kegiatan ekonomi informal. Meningkatnya kesempatan kerja merupakan dampak positif langsung dari pembangunan konstruksi karena kegiatan ini memerlukan sejumlah pekerja yang diperkirakan akan dipenuhi oleh pekerja migran dan lokal. Dampak ini dapat menurunkan dampak lanjutan berupa meningkatnya kualitas SDM lokal, dan pendapatan masyarakat. Meningkatnya kualitas SDM lokal dapat dialami oleh tenaga kerja lokal yang dilibatkan di dalam pembangunan konstruksi. Di dalam kegiatan ini para pekerja lokal dapat belajar dari pekerja pendatang yang biasanya membawa nilai-nilai positif seperti lebih rajin, lebih terampil, lebih ulet, dan sebagainya.

Demikian pula meningkatnya pendapatan rumah-tangga dapat dialami oleh para pekerja local, apa lagi jika sebelumnya mereka menganggur. Meningkatnya pendapatan rumah-tangga akibat meningkatnya kesempatan kerja ini dapat menjadi lebih besar lagi akibat tercipta lowongan kerja dan meningkatnya kesempatan berusaha bagi penduduk local. Terciptanya lowongan berusaha bagi penduduk local terjadi karena diperkirakan banyak pekerja pendatang yang memerlukan layanan catering, laundry, penginapan, tempat kos, dan sebagainya yang dapat disediakan oleh penduduk local di sekitar lokasi IKN. Dampak ini juga dapat terjadi karena Pembangunan konstruksi IKN memerlukan sejumlah bahan (pasir misalnya) dan pekerja (tukang bangunan, pekerja kasar) yang dapat dipasok oleh penduduk local. Selanjutnya dampak ini dapat menurunkan dampak lanjutan (dampak sekunder) berupa terciptanya Pola Nafkah Ganda atau Pekerjaan atau Usaha Sambilan bagi penduduk lokal. Layanan bagi pekerja pendatang yang disebut di atas dapat dilakukan oleh penduduk local Sebagai pekerjaan sambilan yang sebelumnya belum mereka kenal. Dilihat dari skala usaha, kepemilikan izin, dan jumlah pekerja yang terlibat, usaha sambilan tersebut dapat digolongkan Sebagai usaha sektor informal, karena skalanya kecil, tidak memiliki/memerlukan izin, dan hanya sedikit melibatkan pekerja (Swasono, *et al.*, 1986 di dalam Harihanto, 2024.)

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif., dengan menganalisis isi berita tentang dampak sosial dari proyek pemindahan IKN di berbagai media: (1) media massa cetak (koran, majalah, dan lain-lain), (2) media massa *online*, serta (3) media sosial (Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lain). Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan Dampak Sosial Yang Telah Terjadi Dari Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur. Penelitian literatur dilakukan dengan teliti untuk mengumpulkan temuan-temuan terbaru dalam literatur ilmiah, laporan pemerintah, artikel berita, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Analisis Isi Deskriptif, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan diantara variable, analisis ini hanya semata-mata untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan (Eriyanto, 2013 :46).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan secara detail terkait dampak sosial dari pembangunan di suatu wilayah terhadap masyarakat setempat. yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan

membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku-buku dan kanal berita online.

## **Hasil Penelitian**

### ***Dampak Positif yang Telah Terjadi***

#### ***a. Terciptanya Lowongan Kerja***

Dampak yang telah terjadi pada parameter Lowongan Kerja (*vacancy*) ini berupa “Terciptanya Lowongan Kerja” sebagai dampak langsung (primer) dari kegiatan konstruksi pemindahan IKN. Hingga tahun 2024 kegiatan ini telah menciptakan 27.000 lowongan kerja, jumlah pekerja yang terserap pada proyek ini sebanyak 27.000 orang. Walau sebagian besar pekerja ini (70%) didatangkan dari luar, dan hanya sekitar 30% yang berasal dari warga lokal (Hilda B., 2024a), namun karena proyek ini merupakan proyek berskala nasional, maka dampaknya tidak hanya berskala lokal, tapi juga dapat dilihat secara nasional. Bahkan karena proyek ini juga melibatkan investor asing, maka wilayah sebaran dampak juga sampai ke luar negeri.

#### ***b. Meningkatnya Kesempatan Kerja***

Data real tentang Tingkat Kesempatan Kerja/TKK, sebagai ukuran kesempatan kerja/*employment* (Badan Pusat Statistik 2019) di wilayah IKN atau sekitarnya, terutama yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun yang diberitakan media tidak berhasil ditemukan. Tapi jika diasumsikan bahwa 30% pekerja lokal yang dilibatkan di dalam proyek Pembangunan IKN yang disebutkan di atas berasal dari penganggur dan jumlah Angkatan Kerja lokal tetap selama masa konstruksi IKN, maka jelas bahwa “terciptanya lowongan kerja” sebagai dampak positif dari tahap konstruksi dari pemindahan IKN juga meningkatkan TTK bagi penduduk lokal; karena pembilang pada rumus TTK menjadi besar (bertambah), sedangkan penyebutnya (pembaginya) tetap.

#### ***c. Meningkatnya Kesempatan Berusaha***

Demikian pula dampak pada parameter Kesempatan Berusaha, data realnya yang bersumber dari media massa dan media sosial yang digunakan di dalam penelitian ini tidak tersedia. Namun tidak berarti bahwa dampak pada parameter ini tidak terjadi, terutama jika pada skala nasional, karena proyek ini jelas memerlukan bermacam-macam bahan konstruksi dan pekerja, di mana pasokannya biasanya dilakukan oleh pengusaha swasta. Jadi dampaknya dapat berupa “Terciptanya Kesempatan Berusaha”. Karena tercipta kesempatan berusaha baru, maka dengan sendirinya Tingkat Kesempatan Berusaha (TKB) Sebagai ukuran Kesempatan Berusaha (analog dengan Tingkat Kesempatan Kerja/TKK sebagai ukuran Kesempatan Kerja) juga meningkat. Berita di media massa dan media sosial yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini juga hanya berupa analisis dan prakiraan seperti itu. Dampak ini dibedakan/dipisahkan dari dampak meningkatnya kesempatan kerja, karena definisi keduanya berbeda. Bekerja adalah mencari penghasil berupa upah,

sedangkan berusaha adalah mencari penghasilan berupa keuntungan, hasil penyewaan, bunga Tabungan, dan semacamnya (Swasono, et al.1986). Walau dapat juga keduanya digabungkan seperti yang ditulis di dalam Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor 299/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial di Dalam Amdal.

*d. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat*

Tentang dampak pada Pendapatan Masyarakat terdapat klaim bahwa pembangunan IKN selama ini telah meningkatkan pendapatan pengusaha lokal menjadi dua kali lipat dibanding sebelum ada proyek pembangunan IKN (Utami, RT, 2025).

***Dampak Negatif yang Telah Terjadi***

*a. Munculnya Spekulasi Tanah/Lahan*

Dampak ini merupakan dampak yang biasa terjadi pada proyek-proyek Pembangunan yang memerlukan banyak lahan untuk Lokasi kegiatannya. Demikian pula halnya yang terjadi akibat rencana pemindahan IKN (pemindahan IKN pada tahap Persiapan). Harian Tempo (28 Januari 2022) memberitakan adanya serbuan spekulasi ini di IKN. Menurut Tempo hal ini terjadi akibat pemerintah tergesa-gesa menetapkan pemindahan IKN. Para spekulasi ini menurut Tempo berusaha menguasai lahan milik individu dan swasta tetapi juga lahan Masyarakat adat. Dengan tujuan untuk dijual kepada pemerintah sebagai Lokasi IKN. Bahkan Tempo memberitakan ada seorang pejabat yang menguasai sekitar 40 ha lahan di sana, dengan tujuan yang sama. Dampak ini secara langsung jelas telah merugikan para pemilik/penguasaan lahan sebelumnya, karena yang namanya spekulasi biasanya berusaha menguasai lahan dengan segala cara (melalui intimidasi, dan sebagainya), dan membeli dengan harga murah. Untuk mengatasi hal ini atau mengelola dampak negatif ini pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2023.

*b. Terusirnya Sejumlah Warga Lokal*

Secara langsung proyek pemindahan IKN ini ternyata telah menyebabkan terusirnya sejumlah warga lokal dari tempat tinggal mereka semula. Pada bulan Maret 2024, media *Amnesty International* memberitakan bahwa terdapat 200 warga di Kecamatan Sepaku mendapatkan surat dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menginstruksikan masyarakat untuk membongkar bangunan mereka yang berada di lokasi pembangunan IKN. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 25 Januari 2022 berjanji tidak akan menggusur warga setempat dan masyarakat adat di wilayah IKN. Namun yang terjadi para masyarakat Kecamatan Sepaku yang tersebar di empat desa di Sukaraja, Bukit raya, Pemaluan, dan Bumi Harapan menerima dua lembar surat berkop OIKN tertanggal 4 Maret 2024 yang mengungkapkan pada lembar pertama surat

OIKN berupa undangan kehadiran untuk menindaklanjuti pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Tata Ruang IKN. Menurut pengakuan warga, pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan yang dikarenakan kegelisahan warga yang secara mendadak harus merobohkan tempat tinggal mereka yang sudah dibangun jauh sebelum adanya IKN dibangun. Selain itu, OIKN juga mengeluarkan Surat Teguran Pertama yang isinya memberikan waktu 7x24 jam pada hari kerja bagi warga untuk merobohkan bangunan mereka yang menurut OIKN tidak sesuai dengan ketentuan ruang IKN dan peraturan dan perundang-undangan. (*Amnesty International*, 15 Maret 2024).

*c. Konflik Sosial atas Lahan*

Selama tahap persiapan sampai saat ini telah terjadi sejumlah konflik atas lahan yang menyangkut penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan. Konflik ini melibatkan anggota masyarakat, pemerintah (Otorita IKN), Perusahaan, dan pemegang izin. Konflik ini menyangkut 2 086 ha lahan lokasi IKN Sebagai penyebab mundurnya Kepala OIKN dan wakilnya (Susetyo, PD., 2024). Sedangkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Adhuri, DS (di dalam Susetyo, PD., 2024) mengungkapkan bahwa konflik lahan ini cukup rumit, dan terjadi antara perusahaan, transmigran, dan komunitas adat. Namun sayangnya tidak disebutkan Perusahaan yang dimaksud. Bahwa konflik ini melibatkan transmigran dan komunitas adat adalah ya, karena Kecamatan Sepaku merupakan Lokasi Penempatan Transmigran asal Jawa. Adapun komunitas adat yang dimaksud terutama adalah Suku Balik, Suku Maridan, dan Suku Mentawir (Google., 2024).

Konflik lahan juga terjadi di Lokasi Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Very-Very Important (VVI) IKN yang melibatkan sejumlah petani dengan para pekerja Pembangunan Bandara, karena menurut para petani verifikasi atas tanaman mereka di lahan tersebut belum dilakukan (Sucipto, 2024). Hal ini merupakan salah satu bukti nyata dari dampak sosial yang telah terjadi antara otorita dan masyarakat. Padahal salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lain, khususnya Pulau Kalimantan, dan juga mengurangi beban Kota Jakarta. Salah satu penyebab terjadinya konflik ini adalah tidak adanya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat berdasarkan hukum. Walau di sisi lain seperti yang telah ditunjukkan di atas, pemindahan IKN ini telah menciptakan pekerjaan dan usaha baru.

Sedangkan dampak meningkatnya Kriminalitas yang diperkirakan sudah mulai terjadi pada tahap Konstruksi, ternyata nampaknya belum terjadi sampai saat ini. Hal ini terlihat dari belum adanya berita tentang dampak ini di media massa maupun media sosial yang beredar. Dengan belum atau tidak terjadinya dampak ini tentu patut disyukuri.

### ***Dampak Netral yang Telah Terjadi***

#### ***a. Timbulnya Persespi dan Sikap Masyarakat terhadap Proyek Pemindahan IKN***

Dampak ini dikategorikan bersifat netral, karena tergantung kepada kelompok masyarakat yang melihatnya. Sifatnya belum dapat diprakirakan sebelumnya. Yang jelas pasti ada kelompok Masyarakat yang berpersepsi dan bersikap positif, tapi ada juga yang berpersepsi dan bersikap negatif. Jadi yang harus dilihat adalah proporsi keduanya, mana yang lebih banyak? Data yang dipublikasikan di media sosial dan media massa menunjukkan bahwa Sebagian besar Masyarakat, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian wilayahnya menjadi pusat lokasi IKN, yakni Kecamatan Sepaku berpersepsi dan bersikap positif terhadap kebijakan pemindahan IKN, dengan memberikan persetujuan (UJS UHO, 2024). Sayangnya data kuantitatif mengenai hal ini tidak didapat/tidak ditemukan.

Masyarakat lain di Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sebagian wilayahnya juga terkena proyek pemindahan IKN ini memandang bahwa kebijakan dari *pemindahan* ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. (Tody, ES., 2024). Sedangkan di luar Provinsi Kalimantan Timur, Departemen Sosiologi Universitas Airlangga menemukan bahwa sebagian besar responden di Surabaya menganggap persiapan pemindahan IKN oleh pemerintah belum maksimal (Sosiologi Unair, 2024)

#### ***b. Meningkatnya Harga Tanah***

Selain telah menimbulkan dampak negatif berupa munculnya spekulasi tanah, pemindahan IKN juga telah menimbulkan dampak meningkatnya Harga Tanah. Dampak ini merupakan dampak langsung dari proyek pemindahan IKN itu sendiri maupun sebagai dampak turunan (dampak sekunder) dari munculnya spekulasi tanah tersebut. Dampak ini dikategorikan sebagai dampak netral karena dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dilihat dari pemerintah Sebagai pemrakarsa proyek pemindahan IKN, dan dari pembeli tanah, dampak ini tentu bersifat negatif, karena harganya menjadi lebih mahal. Pemerintah harus membayar lebih mahal dari harga sebelumnya, begitu juga bagi investor/pengusaha yang akan membuka usaha di sana. Namun seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah telah mengatasi hal ini dengan menerbitkan PP No. 12 tahun 2023, walau sedikit terlambat. Sedangkan jika dilihat dari sisi warga pemilik lahan, dampak ini bersifat positif, karena harga lahan mereka meningkat. Menurut Tempo.com (2024) nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun lima ribu rupiah per meter persegi, saat ini dapat mencapai Rp350 ribu per meter persegi. (meningkat 70 kali lipat)



## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Sejak tahap Persiapan hingga tahap Konstruksi saat ini Proyek Pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur telah menimbulkan dampak, khususnya dampak di bidang Sosial, baik yang bersifat positif, netral, dan negatif. Setidaknya terdapat lima dampak positif yang telah terjadi, yakni: (1) terciptanya lowongan kerja, (2) meningkatnya kesempatan kerja, (3) meningkatnya kesempatan berusaha, (4) meningkatnya jumlah pengunjung ke IKN, dan (5) meningkatnya pendapatan Masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung ke IKN untuk berwisata merupakan dampak positif yang relative tidak diprakirakan sebelumnya, mengingat IKN tidak dimaksudkan sebagai tempat wisata.

Setidaknya terdapat dua dampak sosial yang bersifat netral yang telah terjadi, yakni (1) timbul atau terbentuknya persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana pemindahan IKN itu, dan (2) meningkatnya harga tanah. Kedua dampak ini dikategorikan bersifat netral karena tergantung pada sudut pandangnya atau kelompok Masyarakat yang memandangnya. Sedangkan dampak negatifnya setidaknya ada tiga yang telah terjadi: (1) timbulnya spekulasi tanah, (2) tergusurnya sebagian warga lokal dari tempat tinggalnya, dan (2) konflik sosial atas lahan.

### ***Saran***

Sesuai dengan maksud dan tujuan pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, yakni untuk pemerataan Pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pemerataan penduduk, khususnya antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, maka disarankan kepada Otorita IKN sebagai pelaksana proyek pemindahan IKN di lapangan untuk mengelola dampak, terutama dampak sosialnya. Pengelolaan harus diarahkan untuk mencegah atau menghindari, menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif, dan meningkatkan dampak positifnya. Pengelolaan dapat dilakukan melalui atau menggunakan pendekatan teknologi, pendekatan kelembagaan, maupun pendekatan sosial, baik sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Pendekatan teknologi misalnya, dapat digunakan untuk mengelola dampak pada lingkungan fisik (udara misalnya) oleh debu dan kebisingan yang dapat mengganggu warga, sehingga mencegah protes atau konflik dengan warga. Pendekatan kelembagaan dapat melibatkan Lembaga desa atau Lembaga Tingkat bawah lainnya (lembaga adat misalnya), sehingga mereka merasa dihargai dan merasa ikut memiliki IKN. Pendekatan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan cara mengutamakan warga lokal yang melamar pekerjaan di proyek IKN sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Bahkan memberikan pelatihan kepada mereka. Pendekatan sosial budaya dapat

dilakukan dengan cara mengikuti tradisi dan adat-istiadat di dalam berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan proyek Pembangunan IKN. Pendekatan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dari setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga, dan mencegah miskomunikasi.

Sebaliknya kepada warga local diharapkan dapat mengadopsi atau menyerap nilai-nilai positif yang dibawa oleh pendatang, baik itu migran spontan atau pekerja proyek yang didatangkan dari luar oleh OIKN, karena pendatang biasanya lebih terampil, lebih rajin, bersedia bekerja apa saja, dan seterusnya. Dengan demikian, mereka (khususnya yang masih menganggur) tidak hanya menjadi penonton dan terdesak oleh pendatang.

Kepada pemerintah daerah di sekitar IKN disarankan untuk menyiapkan warganya agar siap menghadapi persaingan dengan pendatang dengan memberikan atau melanjutkan pelatihan keterampilan yang selama sudah dilakukan. Melindungi dan mendampingi mereka di dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara legal, termasuk hukum dan wilayah adat mereka.

## Daftar Pustaka

Alexander, Hilda B., 2024a *"Hingga Juli ini Pembangunan IKN Serap 27.000 Pekerja"*. , di dalam Kompas.com., 2 Juli 2024., <https://ikn.kompas.com/read/2024/07/26/090000487/hingga-juli-ini-pembangunan-ikn-serap-27.000-pekerja-konstruksi->, diakses tanggal 13 Februari 2025.

Alexander, Hilda B., 2024b., *"Hingga 30 September, Jumlah Kunjungan ke IKN Tembus 23.000 Orang"*., Kompas.com., 30/09/2024., <https://ikn.kompas.com/read/2024/09/30/214449887/hingga-30-september-jumlah-kunjungan-ke-ikn-tembus-23000-orang>, diakses tanggal 12 Februari 2025.

Arief, Ari., 2024., *"Proyek IKN Sumbang 40 Persen Ekonomi PPU"*., Kaltimpost. com.,26 Maret 2024., <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/2384483102/proyek-ikn-sumbang-40-persen-ekonomi-ppu>, diakses tanggal 20 Mei 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS)., *Beranda Statistik Dasar Statistik Sektor*  
*Statistik Khusus Indikator Kuesioner Variabel Solusi Statistik*.

BBC News Indonesia., 27 Maret 2024., *"Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – 'Kami tidak akan melihat kota itu'"*., <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lw2dxo>., diakses tanggal 12 Februari 2025.

Cynthia., 2022., *"IKN, Peluang Usaha Bagi UMKM"*., Kaltimprov.go.id., 07 Maret 2022., <https://dppkukm.kaltimprov.go.id/berita/wagub-ikn-peluang--investasi-dan-usaha-bagi-umkm>, diakses tanggal 20 Mei 2024.

detikFinance. Senin, 16 Sep 2024 22:15 WIB, *"27 Ribu Orang RI Jadi*

*Pekerja Konstruksi di IKN, 30% Warga Lokal"* <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7543310/27-ribu-orang-ri-jadi-pekerja-konstruksi-di-ikn-30-warga-lokal>., diakses tanggal 12 Februari 2025.

Google., 2024. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Komunitas+adat+yang+mendiami+ikn>., diakses tanggal 1 Maret 2025.

Harihanto. 2023. *"Potential Sosial Impacts of the Capital Relocation Plan of the Republic of Indonesia: Identification and Management Alternatives"*. Hongkong Journal of Sosial Sciences, Vol. 61.

I, Suwendra., 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*., Bali: Nilacakra.

Iskandar, A. Halim., 2020. *Sdgs Desa. Pecepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*., Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Internasional, Amnesty., 2024. *di dalam "Jangan gusur warga di Lokasi IKN"*.

15 Maret 2024., <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-gusur-warga-di-lokasi-ikn/03/2024/>., diakses tanggal 26 Juni 2024.

Utami, RT., dalam NERACA, HARIAN EKONOMI., 2025., *Pembangunan Ekonomi IKN Tingkatkan Pendapatan UMKM*., diakses tanggal 24 Februari 2025.

NUSANTARA., 2023., *di dalam "Otorita IKN Terus Tingkatkan Keterlibatan Budaya Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat"*., Senin 18 Desember 2023., <https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-terus-tingkatkan-keterlibatan-budaya-lokal-dan-pemberdayaan-masyarakat>., diakses tanggal 12 Februari 2025.

PT. ERM INDONESIA. 1996. *Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial di Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*.

Sopsilogi UNAIR., 2024., *Opini Masyarakat Mengenai Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur*., <https://sosiologi.fisip.unair.ac.id/opini-masyarakat-mengenai-pemindahan-ibukota-ke-kalimantan-timur/>., diakses tanggal 1 Maret 2024.,

Sucipto, 2024., *Lika-liku di Balik Konflik Lahan Bandara IKN*., IBU KOTA NUSANTARA., 29 Februari 2024., <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/28/likaliku-di-balik-konflik-lahan-bandara-ikn>., diakses tanggal 1

Maret 2024.

Susetyo, PD., 2024. *Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN*., Kompas.com

14/06/2024., <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/14/07441551/konflik-tenurial-mengganjal-pembangunan-ikn?page=all>., diakses 1 Maret 2025.

Swasono, SE., A. Sasano., MZ Nasution., R. Munir., A. Madjid., 1986.

*Studi Kebijkasanaan Pengembangan Sektor Informal., Kerjasama antara Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, Universitas Indonesia dengan Lembaga Studi Pembangunan., Jakarta.*

Tempo, 14 Maret 2024., “*Fakta Penting Konflik Warga Kampung Tua Sabut Kaltim yang Digusur Otorita IKN*”, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-penting-konflik-warga-kampung-tua-sabut-kaltim-yang-digusur-otorita-ikn-77928>., diakses tanggal 12 Februari 2025.

Tempo, 2022. *Serbuan Spekulasi di Tanah Nusantara.*, <https://www.tempo.co/kolom/serbuan-spekulasi-tanah-di-ikn-841285>., diakses tanggal 1 Maret 2025.

Tempo.co. 18 Sept 2024. *Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat.*, <https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-pembangunan-ikn-harga-tanah-di-penajam-paser-utara-melonjak-70-kali-lipat-8347>., diakses tanggal 1 Maret 2025.

Tody, ES., 2024., *Pandangan Masyarakat Desa Loa Janan Ulu Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ke Kalimantan Timur.*, di dalam *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2024., <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1840>.

UJS UHO., 2024. *Persepsi Publik Terhadap Rencana .....*, <https://ojs.uho.ac.id>., diakses tanggal 1 Maret 2024.